



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

RABU, 18 JULI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pansus LHP Sampaikan Tujuh Rekomendasi

KOTA MANNA - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKRI DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) menuntaskan pembahasannya. Ada 7 poin rekomendasi diberikan Pansus untuk Plt Bupati BS, Gusnan Mulyadi untuk segera ditindaklanjuti. Rekomendasi diserahkan langsung pada rapat paripurna DPRD BS, Selasa (17/7).

Ketua Pansus LHP BPK RI, Agusman Jahim menyampaikan hasil pembahasan Pansus terhadap laporan keuangan Pemkab BS tahun 2017. Ada 7 poin hasil pembahasan dan rekomendasi. Direkomendasikan kepada Plt Bupati BS untuk melakukan peninjauan atau evaluasi terhadap kemampuan, kecakapan, kapasitas dan kompetensi dari ASN yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membuat Kabupaten BS gagal meraih WTP.

"OPD khususnya yang tidak mampu memperoleh penilaian dengan WTP harus ikut bertanggung jawab, karena itu kita minta dilakukan

evaluasi," kata Agusman yang merupakan politisi PKPI ini.

Kemudian, dalam rekomendasi untuk Plt Bupati BS juga diminta Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten BS mempelajari kelemahan dari pelaporan pengelolaan keuangan daerah dan melakukan pembinaan kepada semua OPD. Plt juga diminta untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi menyeluruh dalam hal penataan, pemakaian serta pengelolaan barang milik daerah agar tepat guna dan tepat sasaran. "Sesegera mungkin melakukan penyelesaian permasalahan aset di BS," terangnya.

Poin keempat terhadap kelebihan bayar sejak tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017 sesuai dengan rekomendasi BPK. Apabila rekanan atau pihak ketiga tidak menyelesaikan sesuai dengan tenggat waktu maka direkomendasikan kepada Pemkab BS melalui APIP untuk dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), sesuai dengan peraturan pe-

rundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya poin kelima, belum dibayarnya beberapa pekerjaan fisik kepada pihak rekanan agar Pemkab BS menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian DPRD juga merekomendasikan agar Pemkab BS memberikan sanksi kepada pihak rekanan bermasalah dengan melakukan blacklist. "Terakhir poin ketujuh. Terhadap penyelesaian persyaratan pencairan DAK kiranya OPD terkait selalu melakukan koordinasi baik dengan BPKAD maupun Kemendagri dan Kementerian Keuangan," beber Agusman.

Menanggapi rekomendasi dari Pansus DPRD BS, Plt Bupati BS, Gusnan Mulyadi mengatakan bahwa rekomendasi yang diberikan DPRD menindaklanjuti LHP BPK RI Perwakilan Bengkulu terhadap laporan keuangan tahun 2017 sesegera mungkin ditindaklanjuti. "Semoga apa yang diharapkan dalam upaya perbaikan dapat terwujudkan," ujar Gusnan. **(key)**